PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

Dinamika Perkembangan Layanan *Bus Rapid Transit* (BRT) Sebagai Infrastruktur Transportasi Publik di Kota Palangka Raya

Sulistya Ayu Anggraini[1], Resti Arista[2], Siti Komariyah[3], Krisfinata Yulfitri[4], Arya Hendrik Pamorja[5], Syamsuri[6]
[1,2,3,4,5,6]Universitas Palangka Raya, Indonesia
E-mail : sulistyaayuanggraini@gmail.com[1], restiarista05@gmail.com[2], sitikomariyah310706@gmail.com[3], krisfinatayulfitri@gmail.com[4], aryahendrikpamorja@gmail.com[5], syamsuri79@fisip.upr.ac.id[6]

Article History:
Received: 01 Oktober 2026
Revised: 13 Oktober 2026
Accepted: 27 Oktober 2026

Keywords: *BRT, transportasi publik, infrastruktur, pembangunan, Kota Palangka Raya.*

Abstract: *Perkembangan transportasi publik merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan infrastruktur perkotaan karena berhubungan dengan mobilitas masyarakat dan akses terhadap berbagai aktivitas. Kota Palangka Raya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kebutuhan terhadap transportasi publik yang mampu menjangkau kawasan permukiman, pusat kegiatan, serta destinasi wisata. Salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tersebut dilakukan melalui pengembangan Bus Rapid Transit (BRT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perkembangan layanan BRT sebagai infrastruktur transportasi publik di Kota Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder. Data diperoleh melalui studi dokumentasi dan studi literatur yang bersumber dari Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, Pemerintah Kota Palangka Raya, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan transportasi publik dan BRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan layanan BRT terlihat melalui pengembangan rute, halte, perluasan layanan menuju kawasan wisata, serta adanya perencanaan pengembangan jaringan transportasi publik. Namun, pemanfaatan layanan BRT masih mengalami fluktuasi dan jangkauan pelayanan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan infrastruktur BRT perlu diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan, ketepatan jadwal, keterjangkauan rute, serta integrasi dengan kawasan strategis. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan pengembangan layanan secara berkelanjutan agar BRT dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dan mampu mendukung sistem transportasi publik yang efektif di Kota Palangka Raya.*

PENDAHULUAN

Transportasi publik merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan perkotaan karena berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat dan akses terhadap berbagai aktivitas. Transportasi yang baik tidak hanya berfungsi sebagai sarana perpindahan, tetapi juga mendukung kegiatan ekonomi, sosial, pendidikan, pemerintahan, dan pariwisata. Oleh karena itu, pembangunan transportasi perlu diarahkan pada penyediaan layanan yang aman, nyaman, terjangkau, serta mampu menjangkau kebutuhan masyarakat secara luas (Murniati et al., 2017; Utami, 2020). Dalam konteks pembangunan daerah, keberadaan transportasi publik juga menjadi bagian dari penyediaan infrastruktur yang dapat mendukung pemerataan akses masyarakat terhadap berbagai pusat kegiatan.

Kebutuhan terhadap transportasi publik menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat di wilayah perkotaan. Kota Palangka Raya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah memiliki wilayah perkotaan yang cukup luas dengan pola aktivitas masyarakat yang tersebar di berbagai kawasan. Kondisi tersebut membutuhkan sistem transportasi yang mampu menghubungkan kawasan permukiman dengan pusat pendidikan, perdagangan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun kawasan wisata (Utami, 2020). Namun, penggunaan kendaraan pribadi masih menjadi pilihan utama masyarakat. Penelitian mengenai pemilihan moda transportasi di Kota Palangka Raya menunjukkan bahwa faktor biaya, waktu tunggu, dan waktu perjalanan memiliki hubungan dengan keputusan masyarakat dalam memilih moda transportasi (Yuslye et al., 2021). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kualitas pelayanan menjadi salah satu hal yang penting dalam mendorong penggunaan transportasi publik.

Permasalahan penggunaan kendaraan pribadi juga berkaitan dengan kebutuhan pengembangan angkutan umum yang lebih terencana. Pratiwi et al. (2024) menemukan bahwa penggunaan kendaraan pribadi di Kota Palangka Raya masih mendominasi mobilitas masyarakat dan terdapat potensi perpindahan sebagai pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum. Penelitian tersebut memperkirakan potensi perpindahan sebesar 22% atau sekitar 35.150 penumpang per hari. Berdasarkan analisis permintaan, penelitian tersebut juga menghasilkan dua koridor usulan BRT dengan kebutuhan armada dan halte yang disesuaikan dengan karakteristik perjalanan masyarakat (Pratiwi et al., 2024). Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan BRT masih memiliki ruang untuk dilakukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki sistem transportasi publik di Kota Palangka Raya.

Salah satu bentuk pengembangan transportasi publik yang telah dilakukan Pemerintah Kota Palangka Raya adalah penyediaan Bus Rapid Transit (BRT). BRT dikembangkan sebagai salah satu alternatif transportasi publik yang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih aman, nyaman, dan teratur kepada masyarakat (Bagaskara et al., 2023). Pengembangan BRT tidak hanya berkaitan dengan penyediaan armada, tetapi juga mencakup pengaturan rute, halte, jadwal, tarif, serta fasilitas pendukung lainnya. Penelitian Fakhtian dan Budiharjo (2021) menunjukkan bahwa penentuan lokasi halte BRT perlu mempertimbangkan kebutuhan perjalanan dan titik-titik aktivitas masyarakat. Artinya, keberadaan infrastruktur pendukung menjadi bagian penting dalam menentukan kemampuan BRT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Aspek rute juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan layanan BRT. Penelitian Utami (2020) mengenai transportasi umum di Kota Palangka Raya menunjukkan bahwa dari 31 destinasi wisata yang dikaji, hanya enak destinasi yang telah dilayani BRT, sementara destinasi lainnya belum memperoleh pelayanan transportasi umum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jangkauan transportasi publik masih menjadi persoalan dalam mendukung aksesibilitas masyarakat menuju berbagai kawasan, khususnya destinasi wisata (Utami, 2020).

Oleh karena itu, perkembangan BRT perlu dilihat tidak hanya dari keberadaan armada, tetapi juga dari sejauh mana rute dan pelayanan dapat menjangkau kebutuhan perjalanan masyarakat.

Selain persoalan jangkauan, pengembangan BRT juga berkaitan dengan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi tersebut. Bagaskara et al. (2023) melalui penelitian terhadap 100 responden menemukan adanya ketertarikan masyarakat untuk menggunakan BRT dalam perjalanan wisata di Kota Palangka Raya. Minat tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kepemilikan kendaraan, pengalaman menggunakan bus wisata dalam kota, dan frekuensi perjalanan. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa 76% responden menyatakan setuju apabila diterapkan tarif untuk layanan BRT wisata (Bagaskara et al., 2023). Temuan ini menunjukkan bahwa BRT memiliki peluang untuk dikembangkan tidak hanya sebagai mode transportasi regular, tetapi juga mendukung aktivitas wisata di Kota Palangka Raya.

Perkembangan layanan BRT kemudian terlihat melalui adanya bentuk pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas wilayah. Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya pada tahun 2025 menyediakan layanan BRT gratis menuju sejumlah destinasi wisata, di antaranya melalui rute Pasuk Kameluh- Wisata Rawan Bahalap dan Pasuk Kameluh-Wisata Surung Danum (Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, 2025). Layanan tersebut menjadi salah satu bentuk pengembangan pelayanan transportasi publik yang menghubungkan masyarakat dengan kawasan wisata. Jika dibandingkan dengan kondisi yang ditemukan Utami (2020), perkembangan tersebut menunjukkan adanya upaya perluasan fungsi BRT dari transportasi publik perkotaan menuju layanan yang juga mendukung aktivitas wisata.

Perkembangan BRT juga dapat dilihat dari upaya pemerintah dalam merencanakan sistem transportasi yang lebih terstruktur. Pemerintah Kota Palangka Raya melalui kajian *Collaborative Governance* bidang transportasi publik tahun 2023 menunjukkan bahwa BRT termasuk salah satu alternatif yang dipilih masyarakat dalam skenario pengembangan transportasi publik. Dalam kajian tersebut, 120 dari 268 responden atau sekitar 45% memilih BRT sebagai salah satu alternatif pengembangan transportasi publik (Pemerintah Kota Palangka Raya, 2023). Kajian tersebut juga membahas kebutuhan pengembangan transportasi yang lebih terintegrasi, termasuk kemungkinan penerapan konsep BRT dengan layanan pengumpan (feeder). Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan BRT mulai ditempatkan dalam pembahasan yang lebih luas mengenai sistem transportasi publik perkotaan.

Meskipun demikian, perkembangan BRT di Kota Palangka Raya masih menghadapi berbagai persoalan. Anjely (2025) dalam kajiannya mengenai kebijakan transportasi publik di Kota Palangka Raya menemukan bahwa pengembangan BRT pada periode 2020–2024 dilakukan secara bertahap, termasuk melalui perluasan rute dan penyediaan layanan gratis. Namun, pengembangan tersebut masih menghadapi kendala berupa keterbatasan armada, infrastruktur pendukung, sumber daya pelaksana, penyebaran informasi, dan partisipasi masyarakat (Anjely, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan BRT tidak hanya berkaitan dengan keputusan untuk menyediakan layanan, tetapi juga membutuhkan kesiapan sumber daya dan dukungan berbagai pihak agar pelayanan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Data jumlah penumpang juga memberikan gambaran mengenai dinamika pelayanan BRT. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya yang dikutip dalam penelitian Anjely (2025), jumlah penumpang BRT pada layanan wisata tercatat sebanyak 569 orang pada tahun 2020, meningkat menjadi 869 orang pada 2021, kemudian menurun menjadi 334 orang pada 2022, meningkat kembali menjadi 583 orang pada 2023, dan tercatat 452 orang pada 2024. Perubahan jumlah penumpang tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan layanan BRT mengalami naik turun dari tahun ke tahun. Kondisi ini menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam

melihat perkembangan pelayanan transportasi publik, karena keberadaan layanan belum secara otomatis menunjukkan tingkat pemanfaatan yang konsisten oleh masyarakat (Anjely, 2025).

Dari beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa pembahasan mengenai BRT di Kota Palangka Raya telah dilakukan dari berbagai sisi. Utami (2020) membahas keterkaitan transportasi umum dengan aksesibilitas pariwisata, Fakhtian dan Budiharjo (2021) membahas rute dan lokasi halte, Yuslye et al. (2021) membahas faktor pemilihan moda transportasi, Bagaskara et al. (2023) membahas minat masyarakat terhadap BRT wisata, sedangkan Pratiwi et al. (2024) membahas perencanaan operasional BRT (Utami, 2020; Fakhtian & Budiharjo, 2021; Yuslye et al., 2021; Bagaskara et al., 2023; Pratiwi et al., 2024). Penelitian Anjely (2025) kemudian memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan transportasi publik dan perkembangan pra-sistem BRT pada periode 2020–2024. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa BRT telah menjadi bagian dari pembahasan pembangunan transportasi publik di Kota Palangka Raya.

Namun, penelitian-penelitian tersebut cenderung membahas aspek tertentu, seperti aksesibilitas, lokasi halte, pemilihan moda, minat masyarakat, maupun perencanaan operasional. Pembahasan mengenai dinamika perkembangan BRT sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur transportasi publik yang melihat perubahan layanan, pengembangan rute dan fasilitas, pemanfaatan layanan, serta berbagai kendala dalam proses pengembangannya masih dapat diperluas (Fakhtian & Budiharjo, 2021; Bagaskara et al., 2023; Pratiwi et al., 2024; Anjely, 2025). Oleh karena itu, pembahasan mengenai perkembangan BRT secara lebih menyeluruh diperlukan untuk melihat bagaimana layanan tersebut berkembang dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan transportasi masyarakat Kota Palangka Raya.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini membahas " Dinamika Perkembangan Layanan Bus Rapid Transit (BRT) sebagai Infrastruktur Transportasi Publik di Kota Palangka Raya ." Pembahasan diarahkan pada perkembangan layanan BRT, perubahan dan pengembangan rute serta infrastruktur pendukung, pemanfaatan layanan oleh masyarakat, dan berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengembangannya. Dengan menggunakan data sekunder dari penelitian terdahulu dan dokumen pemerintah, artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai dinamika pembangunan transportasi publik melalui perkembangan layanan BRT di Kota Palangka Raya.

LANDASAN TEORI

1. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu bagian penting dalam Pembangunan daerah karena berkaitan dengan penyediaan fasilitas yang mendukung aktivitas masyarakat. Infrastruktur transportasi memiliki peran dalam menghubungkan masyarakat dengan berbagai pusat kegiatan, seperti Kawasan pemukiman, Pendidikan, perdagangan, pelayanan publik, dan pariwisata. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan keterhubungan antarwilayah. Dalam konteks pembangunan perkotaan, trasnportasi publik menjadi salah satu bentuk infrastruktur yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana pergerakan, tetapi juga sebagai bagian dari pelayanan publik yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (Murniati et al., 2017; Utami, 2020).

2. Transportasi Publik

Transportasi publik merupakan layanan transportasi yang disediakan untuk digunakan oleh masyarakat secara Bersama-sama. Keberadaan trasnportasi publik dibutuhkan untuk menyediakan alternatif perjalanan selain kendaraan pribadi, terutama di wilayah perkotaan dengan Tingkat mobilitass yang tinggi. Kualitas pelayanan transportasi dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti waktu perjalanan, waktu tunggu, biaya, aksesibilitas, kenyamanan, dan kemudahan memperoleh layanan. Yuslye et al. (2021) menunjukkan bahwa biaya, waktu tunggu, dan waktu perjalanan

memiliki hubungan dengan pemilihan moda transportasi masyarakat di Kota Palangka Raya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan transportasi publik tidak hanya berkaitan dengan jumlah armada, tetapi juga dengan kualitas dan kesesuaian pelayanan terhadap kebutuhan pengguna.

3. *Bus Rapid Transit* (BRT)

Bus Rapid Transit (BRT) merupakan salah satu bentuk transportasi publik berbasis bus yang dikembangkan dengan system pelayanan yang lebih terencana. Pengembangan BRT mencakup berbagai komponen, seperti rute, halte, armada, jadwal, tarif, serta fasilitas pendukung. Karena itu, keberhasilan pelayanan BRT tidak hanya ditentukan oleh tersedianya bus, tetapi juga oleh keterhubungan antara berbagai komponen tersebut. Penelitian Fakhitan dan Budiharjo (2021) menunjukkan bahwa penentuan lokasi halte BRT perlu mempertimbangkan titik permintaan dan aktivitas masyarakat agar pelayanan dapat menjangkau pengguna secara lebih efektif.

4. Dinamika Perkembangan Layanan BRT

Dinamika perkembangan layanan dapat dipahami sebagai perubahan yang terjadi dalam proses pengembangan suatu layanan dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini, dinamika tersebut dilihat melalui perubahan rute, pengembangan infrastruktur pendukung, bentuk pelayanan, jumlah atau pemanfaatan layanan, serta kebijakan yang dilakukan pemerintah. Perkembangan BRT di Kota Palangka Raya sendiri menunjukkan adanya perubahan bentuk pelayanan, termasuk pengembangan layanan menuju Kawasan wisata dan perencanaan system transportasi yang lebih terintegrasi (Pemerintah Kota Palangka Raya, 2023; Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, 2025).

5. BRT sebagai Infrastruktur dan Pelayanan Publik

BRT dapat dipandang dari dua sisi, yaitu sebagai infrastruktur transportasi dan sebagai pelayanan publik. Sebagai infrastruktur, BRT membutuhkan armada, halte, rute, dan fasilitas pendukung agar dapat beroperasi. Sementara sebagai pelayanan publik, BRT ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat dengan pelayanan yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Bagaskara et al. (2023) menunjukkan adanya potensi minat masyarakat terhadap penggunaan BRT untuk kegiatan wisata di Kota Palangka Raya, sedangkan Pratiwi et al. (2024) menunjukkan bahwa pengembangan BRT membutuhkan perencanaan rute, armada, waktu perjalanan, headway, dan hakte.

6. Kerangka Analisis

Berdasarkan konsep tersebut, penelitian ini melihat perkembangan BRT melalui empat aspek utama, yaitu, (1) perkembangan layanan dan rute, (2) perkembangan infrastruktur pendukung, (3) pemanfaatan layanan oleh masyarakat, dan (4) tantangan pengembangan. Keempat aspek tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana BRT berkembang sebagai bagian dari Pembangunan infrastruktur transportasi publik di Kota Palangka Raya. Dengan demikian, landasan teori tidak hanya menjadi penjelasan konseptual, tetapi juga menjadi dasar dalam mengarahkan pembahasan hasil penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dinamika perkembangan layanan Bus Rapid Transit (BRT) sebagai infrastruktur transportasi publik di Kota Palangka Raya. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya melihat keberasaan BRT, tetapi juga membahas perubahan layanan, pengembangan rute dan infrastruktur pendukung, pemanfaatan layanan, serta berbagai kendala yang muncul dalam proses pengembangannya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini Adalah data skunder. Data tersebut diperoleh dari dokumen pemerintah, publikasi resmi instansi terkait, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian

terdahulu yang membahs transportasi publik dan BRT di Kota Palangka Raya. Penggunaan data sekunder disesuaikan dengan tujuan penelitian yang berfokus pada perkembangan layanan BRT berdasarkan informasi dan data yang telah tersedia.

Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, Pemerintah Kota Palangka Raya, serta berbagai penelitian terdahulu mengenai transportasi publik. Informasi dari Dinas Perhubungan digunakan untuk melihat perkembangan pelayanan BRT, termasuk bentuk layanan menuju destinasi wisata. Sementara itu, kajian Pemerintah Kota Palangka Raya dan penelitian terdahulu digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan transportasi publik, rute, halte, minat masyarakat, serta perencanaan pengembangan BRT (Pemerintah Kota Palangka Raya, 2023; Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, 2025). Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi Pustaka. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam dokumen dan publikasi resmi pemerintah yang berkaitan dengan BRT. Studi Pustaka dilakukan dengan menelusuri artikel jurnal dan hasil penelitian yang relevan dengan trasnportasi publik, BRT, aksesibilitas, serta Pembangunan infrastruktur transportasi di Kota Palangka Raya.

Data yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian dengan focus penelitian. Data tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam beberapa aspek, yaitu perkembangan layanan BRT, perkembangan rute dan infrastruktur pendukung, pemanfaatan layanan oleh masyarakat, serta kendala dalam pengembangan BRT. Pengelompokkan ini dilakukan agar informasi dari berbagai sumber dapat disusun secara sistematis dan memudahkan proses analisis. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber berdasarkan periode dan aspek yang diteliti. Data berupa jumlah penumpang, jumlah rute, armada, maupun informasi mengenai halte digunakan untuk menggambarkan perubahan pelayanan BRT. Sementara itu, informasi dari dokumen pemerintah dan penelitian terdahulu digunakan untuk menjelaskan factor pendukung dan kendala yang memengaruhi perkembangan layanan BRT.

Hasil analisis kemudian disusun secara naratif untuk memberikan Gambaran mengenai dinamika perkembangan BRT sebagai infrastruktur transportasi publik di Kota Palangka Raya. Analisis tidak hanya melihat perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu, tetapi juga menghubungkan perkembangan tersebut dengan kebutuhan mobilitas masyarakat, pengembangan infrastruktur, perluasan pelayanan, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan transportasi publik. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai perkembangan layanan BRT di Kota Palangka Raya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian mengenai perkembangan layanan Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Palangka Raya diperoleh melalui penelusuran data sekunder dari dokumen pemerintah dan penelitian terdahulu. Data yang ditemukan kemudian dikelompokkan berdasarkan perkembangan layanan, rute, dan infrastruktur, pemanfaatan layanan, serta pengembangan BRT sebagai transportasi publik.

1. Perkembangan Layanan BRT

Berdasarkan data yang dikumpulkan, BRT telah menjadi salah satu bentuk transportasi publik yang dikembangkan di Kota Palangka Raya. Perkembangannya tidak hanya berkaitan dengan pengoperasian armada, tetapi juga mencakup rute, halte, pelayanan menuju kawasan wisata, serta perenanaan pengembangan sistem transportasi publik.

Tabel 1. Data Perkembangan Layanan BRT Kota Palangka Raya

No.	Aspek	Hasil/Temuan	Sumber
1.	Fungsi BRT	BRT digunakan sebagai salah satu moda transportasi public di Kota Palangka Raya.	Fakhtian & Budiharjo (2021).
2.	Infrastruktur halte	Evaluasi Koridor II menghasilkan 15 lokasi halte yang dianggap optimal berdasarkan kebutuhan perjalanan.	Fakhtian & Budiharjo (2021).
3.	Akses wisata	Dari 31 destinasi wisata yang dikaji, 6 destinasi telah dilayani BRT.	Utami (2020).
4.	Minat masyarakat	Penelitian terhadap 100 responden menunjukkan adanya minat menggunakan BRT sebagai transportasi wisata.	Bagaskara et al (2023).
5.	Pengembangan wisata	BRT digunakan untuk layanan menuju destinasi wisata Rawan Bahalap dan Surung Danum.	Dinas perhubungan Kota Palangka Raya (2025).
6.	Jumlah penumpang wisata 2020	569 penumpang.	Anjely (2025).
7.	Jumlah penumpang wisata 2021	869 penumpang.	Anjely (2025).
8.	Jumlah penumpang wisata 2022	334 penumpang.	Anjely (2025).
9.	Jumlah penumpang wisata 2023	583 penumpang.	Anjely (2025).
10.	Jumlah penumpang wisata 2024	452 penumpang.	Anjely (2025).
11.	Pilihan masyarakat terhadap BRT	120 dari 268 responden (45%) memilih BRT sebagai salah satu alternatif pengembangan transportasi publik.	Pemerintah Kota Palangka Raya (2023).
12.	Perencanaan sistem	Pengembangan BRT mencakup rute, armada, halte, waktu perjalanan, dan *headway*.	Pratiwi et al. (2024)

Sumber: Diolah dari berbagai penelitian dan dokumen pemerintah.

2. Perkembangan Rute dan Infrastruktur

Data penelitian terdahulu menunjukkan bahwa rute dan infrastruktur pendukung menjadi bagian penting dalam perkembangan BRT di Kota Palangka Raya. Fakhtian dan Budiharjo (2021) melakukan evaluasi terhadap BRT Koridor II dan menemukan kebutuhan penataan lokasi halte berdasarkan titik permintaan perjalanan. Hasil kajian tersebut menunjukkan terdapat 15 lokasi halte yang dinilai optimal untuk mendukung pelayanan BRT. Selain itu, penelitian Pratiwi et al. (2024) mengenai perencanaan angkutan umum dengan konsep BRT menghasilkan dua koridor yang direncanakan untuk mendukung sistem transportasi Kota Palangka Raya. Koridor pertama memiliki panjang 17,1 km, sedangkan koridor kedua memiliki panjang 22 km. Perencanaan tersebut juga mencakup kebutuhan armada, waktu perjalanan, headway, frekuensi pelayanan, serta kebutuhan halte.

Data tersebut menunjukkan bahwa pengembangan BRT memiliki beberapa komponen yang saling berkaitan, yaitu rute, armada, halte, waktu pelayanan, dan frekuensi perjalanan. Dengan demikian, perkembangan layanan BRT tidak hanya dapat dilihat dari keberadaan bus, tetapi juga dari perkembangan infrastruktur dan sistem yang mendukung pengoperasiannya.

3. Perkembangan Jangkauan Layanan

Dari sisi jangkauan, penelitian Utami (2020) menunjukkan bahwa pelayanan transportasi umum di Kota Palangka Raya, termasuk BRT, masih terbatas pada sejumlah destinasi. Dari 31 destinasi wisata yang menjadi objek kajian, hanya enam destinasi yang telah memperoleh layanan BRT. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar destinasi wisata yang dikaji belum memiliki akses langsung melalui layanan BRT.

Perkembangan berikutnya terlihat pada adanya layanan BRT menuju destinasi wisata pada tahun 2025. Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya menyediakan layanan BRT gratis dengan rute Pasuk Kameluh–Wisata Rawan Bahalap dan Pasuk Kameluh–Wisata Surung Danum pada Februari 2025. Layanan tersebut merupakan bagian dari inovasi SI-LANCIP dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

4. Perkembangan Layanan BRT

Data jumlah penumpang layanan BRT wisata menunjukkan adanya perubahan dari tahun ke tahun. Jumlah penumpang pada 2020 tercatat sebanyak 569 orang, kemudian meningkat menjadi 869 orang pada 2021. Pada 2022 jumlah tersebut menurun menjadi 334 orang, kemudian meningkat kembali menjadi 583 orang pada 2023, dan kembali menurun menjadi 452 orang pada 2024 (Anjely, 2025).

Tabel 2. Perkembangan Layanan BRT

Tahun	Jumlah Penumpang BRT Wisata
2020	569
2021	869
2022	334
2023	583
2024	452
Total	**2.807**

Sumber: Data Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya yang dikutip dalam Anjely (2025)

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah penumpang tertinggi terjadi pada 2021, yaitu 869 orang, sedangkan jumlah terendah terjadi pada 2022, yaitu 334 orang. Setelah mengalami penurunan pada 2022, jumlah penumpang kembali meningkat pada 2023 sebelum mengalami penurunan pada 2024.

5. Minat Masyarakat terhadap BRT

Penelitian Bagaskara et al. (2023) mengenai potensi pengembangan BRT sebagai transportasi pariwisata menggunakan 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketertarikan masyarakat terhadap penggunaan BRT untuk perjalanan wisata. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa sebagian besar responden dapat menerima kemungkinan penerapan tarif pada layanan BRT wisata, dengan 76% responden menyatakan setuju dan 24% menyatakan tidak setuju.

Selain itu, kajian *Collaborative Governance* bidang transportasi publik Kota Palangka Raya tahun 2023 menunjukkan bahwa BRT menjadi salah satu alternatif yang dipilih masyarakat dalam pengembangan transportasi publik. Dari 268 responden, sebanyak 120 responden atau sekitar 45% memilih BRT sebagai salah satu skenario pengembangan transportasi publik.

6. Bentuk Pengembangan Layanan

Berdasarkan keseluruhan data, bentuk perkembangan layanan BRT di Kota Palangka Raya dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel 3. Bentuk Perkembangan Layanan BRT di Kota Palangka Raya

Aspek Perkembangan	Kondisi yang Ditemukan
Layanan	Brt dikembangkan sebagai salah satu moda transportasi publik
Rute	Terdapat pengembangan dan perencanaan koridor untuk memperluas pelayanan
Halte	Dilakukan evaluasi dan penentuan lokasi halte berdasarkan kebutuhan perjalanan
Wisata	BRT mulai digunakan untuk menghubungkan masyarakat dengan destinasi wisata
Pemanfaatan	Jumlah penumpang BRT wisata mengalami fluktuasi selama 2020-2024
Minat masyarakat	Terdapat minat terhadap penggunaan BRT untuk transportasi wisata
perencanaan	Pengembangan mencakup armada, rute, halte, *headway*, dan waktu perjalanan

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan BRT di Kota Palangka Raya berlangsung pada beberapa sisi, yaitu pengembangan layanan, rute, infrastruktur halte, jangkauan menuju kawasan wisata, serta perencanaan sistem transportasi. Namun, data jumlah penumpang juga menunjukkan bahwa pemanfaatan layanan BRT wisata masih mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

Pembahasan

1. Perkembangan BRT sebagai Infrastruktur Transportasi Publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan BRT di Kota Palangka Raya tidak hanya berkaitan dengan keberadaan armada, tetapi mencakup berbagai komponen pendukung seperti rute, halte, jadwal, dan sistem pelayanan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa BRT dapat dipahami sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur transportasi sekaligus pelayanan publik. Infrastruktur transportasi pada dasarnya berfungsi untuk mendukung mobilitas masyarakat dan menghubungkan berbagai pusat kegiatan. Oleh karena itu, pembangunan BRT perlu memperhatikan keterhubungan antara sarana fisik dengan sistem pelayanan agar infrastruktur yang disediakan dapat benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat (Murniati et al., 2017; Utami, 2020).

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Fakhtian dan Budiharjo (2021) yang menunjukkan bahwa perkembangan BRT Koridor II masih membutuhkan penyesuaian pada beberapa aspek operasional. Penentuan lokasi halte, misalnya, perlu mempertimbangkan lokasi bangkitan dan tarikan perjalanan masyarakat. Artinya, pembangunan infrastruktur BRT tidak cukup hanya berdasarkan ketersediaan lahan atau pertimbangan teknis, tetapi juga harus mempertimbangkan pola aktivitas pengguna. Apabila halte berada terlalu jauh dari pusat aktivitas masyarakat, keberadaan halte tersebut belum tentu meningkatkan aksesibilitas transportasi publik.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan BRT merupakan proses yang membutuhkan evaluasi secara berkelanjutan. Perubahan pola perjalanan masyarakat dapat menyebabkan kebutuhan terhadap rute dan fasilitas transportasi ikut berubah. Karena itu, perkembangan BRT seharusnya tidak berhenti pada penyediaan armada, tetapi dilanjutkan dengan evaluasi terhadap kualitas pelayanan dan kesesuaian infrastruktur. Dalam perspektif pembangunan, kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan transportasi publik tidak hanya dilihat dari jumlah fasilitas yang dibangun, tetapi juga dari manfaat fasilitas tersebut bagi masyarakat.

2. Rute dan Aksebilitas sebagai Faktor Penting dalam Pengembangan BRT

Rute merupakan salah satu komponen yang menentukan tingkat aksesibilitas suatu layanan transportasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode sebelumnya jangkauan BRT terhadap destinasi wisata di Kota Palangka Raya masih terbatas. Utami (2020) menemukan bahwa dari 31 destinasi wisata yang dikaji, hanya enam destinasi yang dilayani oleh BRT. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan transportasi publik belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh kawasan yang memiliki aktivitas masyarakat.

Keterbatasan rute dapat memengaruhi keputusan masyarakat dalam menggunakan transportasi publik. Masyarakat cenderung memilih moda yang memberikan akses lebih mudah dan waktu perjalanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini sejalan dengan Yuslye et al. (2021) yang menunjukkan bahwa biaya, waktu tunggu, dan waktu perjalanan memiliki hubungan dengan pemilihan moda transportasi di Kota Palangka Raya. Dengan demikian, pengembangan rute BRT perlu mempertimbangkan bukan hanya jarak antarkawasan, tetapi juga pola perjalanan, waktu tempuh, lokasi pusat kegiatan, dan kebutuhan masyarakat.

Jika dilihat dari perkembangan pelayanan, terdapat upaya pemerintah untuk memperluas fungsi rute BRT menuju kawasan wisata. Layanan BRT gratis yang menghubungkan Pasuk Kameluh dengan Wisata Rawan Bahalap dan Wisata Surung Danum pada tahun 2025 menjadi salah

satu contoh penyesuaian pelayanan terhadap aktivitas wilayah (Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa rute BRT dapat dikembangkan secara lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan tertentu.

Namun, pelayanan menuju destinasi wisata tersebut belum dapat langsung diartikan sebagai penyelesaian seluruh persoalan aksesibilitas. Layanan yang dilakukan pada waktu tertentu berbeda dengan jaringan BRT reguler yang beroperasi secara rutin. Oleh sebab itu, pengembangan rute masih perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat, potensi permintaan, dan kemampuan operasional pemerintah.

3. BRT sebagai Pendukung Kegiatan Pariwisata

Perkembangan BRT menuju kawasan wisata menunjukkan adanya perluasan fungsi transportasi publik di Kota Palangka Raya. Transportasi publik pada dasarnya tidak hanya berhubungan dengan perjalanan rutin masyarakat, tetapi juga dapat mendukung kegiatan ekonomi dan pariwisata. Ketika suatu destinasi dapat dijangkau menggunakan transportasi publik, masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi memiliki alternatif perjalanan yang lebih mudah.

Bagaskara et al. (2023) menemukan adanya potensi minat masyarakat terhadap penggunaan BRT sebagai transportasi wisata di Kota Palangka Raya. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki peluang untuk menerima pengembangan BRT sebagai moda perjalanan wisata. Tingginya persentase responden yang menyetujui kemungkinan adanya tarif BRT wisata juga menunjukkan bahwa sebagian masyarakat dapat menerima konsep pelayanan yang memiliki nilai ekonomi selama layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan.

Temuan tersebut menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan layanan BRT gratis menuju destinasi wisata yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan pada 2025. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menghubungkan transportasi publik dengan sektor pariwisata. Dalam perspektif pembangunan daerah, keterhubungan antara transportasi dan pariwisata dapat memberikan manfaat karena akses transportasi merupakan salah satu faktor yang mendukung kemudahan masyarakat dalam mengunjungi suatu destinasi.

Meskipun demikian, pengembangan BRT wisata tetap perlu mempertimbangkan keberlanjutan layanan. Layanan gratis dapat menjadi bentuk stimulasi untuk meningkatkan minat masyarakat, tetapi dalam jangka panjang pemerintah tetap perlu mempertimbangkan biaya operasional, jumlah pengguna, jadwal, dan pola permintaan. Dengan demikian, pengembangan BRT wisata tidak hanya berorientasi pada penyediaan layanan sesaat, tetapi juga perlu diarahkan pada sistem yang dapt dipertahankan secara berkelanjutan.

4. Fluktuasi Pemanfaatan BRT dan Respons Masyarakat

Data jumlah penumpang BRT wisata selama 2020–2024 menunjukkan pola yang tidak stabil. Jumlah penumpang meningkat pada 2021, mengalami penurunan cukup besar pada 2022, kemudian kembali meningkat pada 2023 dan menurun pada 2024. Pola tersebut menunjukkan bahwa keberadaan layanan transportasi publik belum secara otomatis menghasilkan peningkatan jumlah pengguna secara terus-menerus.

Dalam teori transportasi publik, keputusan masyarakat menggunakan suatu moda dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan, termasuk biaya, waktu tunggu, waktu perjalanan, kenyamanan, dan kemudahan akses. Temuan Yuslye et al. (2021) memperkuat hal tersebut dalam konteks Kota Palangka Raya. Karena itu, fluktuasi jumlah penumpang dapat menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan pemerintah dalam mengevaluasi pelayanan BRT.

Penurunan jumlah penumpang tidak seharusnya langsung dipahami sebagai kegagalan layanan. Data tersebut lebih tepat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui apakah rute, jadwal, fasilitas, dan informasi pelayanan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Begitu pula

ketika terjadi peningkatan jumlah penumpang, pemerintah perlu melihat faktor apa yang mendorong peningkatan tersebut agar dapat dipertahankan atau dikembangkan.

Dengan demikian, pemanfaatan masyarakat menjadi bagian penting dalam melihat keberhasilan pembangunan transportasi publik. Infrastruktur yang tersedia akan memberikan manfaat yang lebih besar apabila masyarakat benar-benar menggunakannya. Oleh karena itu, pengembangan BRT perlu menempatkan masyarakat sebagai pengguna utama layanan, bukan hanya sebagai penerima fasilitas pembangunan.

5. Kebutuhan Integrasi dalam Pengembangan Sistem BRT

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengembangkan sistem transportasi yang lebih terintegrasi. Kajian *Collaborative Governance* bidang transportasi publik Kota Palangka Raya tahun 2023 menunjukkan bahwa BRT menjadi salah satu alternatif yang dipilih masyarakat dalam pengembangan transportasi publik. Hal tersebut menunjukkan adanya penerimaan terhadap BRT sebagai salah satu bagian dari solusi transportasi perkotaan.

Namun, BRT tidak mungkin menjangkau seluruh kawasan Kota Palangka Raya secara langsung. Karena itu, pengembangan BRT perlu mempertimbangkan keterhubungan dengan moda atau layanan pengumpan (*feeder*). Konsep tersebut memungkinkan masyarakat yang tinggal di luar koridor utama untuk tetap memperoleh akses menuju jaringan BRT.

Kebutuhan integrasi juga terlihat dari perencanaan sistem BRT yang mencakup rute, jumlah armada, headway, waktu perjalanan, dan halte (Pratiwi et al., 2024). Setiap komponen tersebut saling berkaitan. Penambahan armada tanpa penyesuaian jadwal belum tentu meningkatkan kualitas pelayanan, begitu pula pembangunan halte tanpa mempertimbangkan pola perjalanan masyarakat belum tentu meningkatkan jumlah pengguna.

Dengan demikian, pengembangan BRT di Kota Palangka Raya perlu diarahkan dari pendekatan yang hanya berfokus pada penyediaan moda menuju pendekatan sistem transportasi yang lebih terintegrasi. Integrasi tersebut dapat mencakup integrasi rute, halte, jadwal, informasi, serta keterhubungan dengan kawasan permukiman dan pusat aktivitas masyarakat.

6. Tantangan dalam Pengembangan BRT

Meskipun terdapat berbagai perkembangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan BRT masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah menjaga kesesuaian antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian Fakhtian dan Budiharjo (2021) menunjukkan bahwa masih terdapat aspek operasional BRT yang membutuhkan perbaikan, terutama berkaitan dengan jadwal dan pelayanan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan transportasi publik membutuhkan pengelolaan yang berkelanjutan.

Tantangan lainnya adalah meningkatkan daya tarik masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi. Yuslye et al. (2021) menunjukkan bahwa faktor biaya, waktu tunggu, dan waktu perjalanan memiliki hubungan dengan pemilihan moda. Apabila BRT memiliki waktu tunggu yang lama atau rute yang kurang sesuai, masyarakat dapat kembali memilih kendaraan pribadi karena dianggap lebih praktis.

Persoalan tersebut menjadi penting karena tujuan pembangunan transportasi publik bukan sekadar menyediakan alternatif kendaraan, tetapi juga menciptakan sistem yang mampu menjadi pilihan nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan secara berkala, termasuk kondisi armada, ketepatan waktu, rute, halte, informasi pelayanan, serta tingkat kepuasan pengguna.

Selain pemerintah, pengembangan BRT juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pengelolaan transportasi publik berkaitan dengan masyarakat sebagai pengguna, pemerintah sebagai penyedia kebijakan dan layanan, serta pihak lain yang dapat mendukung penyediaan

infrastruktur dan pengelolaan sistem. Pendekatan kolaboratif menjadi penting karena persoalan transportasi perkotaan tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu kebijakan atau satu instansi.

7. Dinamika Perkembangan BRT dalam Pembangunan Kota Palangka Raya

Jika dilihat secara keseluruhan, perkembangan BRT di Kota Palangka Raya menunjukkan adanya proses yang bersifat dinamis. Perkembangan tersebut terlihat dari perubahan bentuk pelayanan, penataan infrastruktur, pengembangan rute, pemanfaatan BRT untuk kawasan wisata, serta adanya perencanaan menuju sistem transportasi yang lebih terintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa BRT terus mengalami penyesuaian terhadap kebutuhan pembangunan dan mobilitas masyarakat.

Dari perspektif pembangunan infrastruktur, perkembangan tersebut merupakan hal positif karena pemerintah telah berupaya menyediakan alternatif transportasi publik dan mengembangkan fasilitas pendukungnya. Namun, pembangunan belum dapat dikatakan optimal hanya berdasarkan keberadaan armada dan rute. Kualitas pembangunan juga perlu dilihat dari aksesibilitas, tingkat pemanfaatan, kesesuaian pelayanan, dan kemampuan sistem dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Dinamika perkembangan BRT juga menunjukkan adanya pergeseran fungsi pelayanan. BRT tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perjalanan masyarakat sehari-hari, tetapi mulai dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas wisata. Perubahan tersebut menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pengembangan pelayanan publik. Pemerintah dapat menyesuaikan penggunaan infrastruktur yang tersedia dengan karakteristik dan potensi wilayah.

Dengan demikian, perkembangan BRT di Kota Palangka Raya dapat dikatakan mengalami perkembangan dalam hal cakupan fungsi dan bentuk pelayanan, tetapi masih membutuhkan penguatan dalam aspek aksesibilitas, konsistensi pelayanan, integrasi sistem, dan pemanfaatan masyarakat. Ke depan, pengembangan BRT perlu dilakukan berdasarkan data permintaan dan evaluasi pelayanan secara berkala agar pembangunan infrastruktur transportasi tidak hanya menghasilkan fasilitas, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, perkembangan layanan Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Palangka Raya menunjukkan adanya upaya peningkatan transportasi publik melalui pengembangan rute, halte, serta perluasan layanan menuju beberapa kawasan wisata. BRT tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas masyarakat, tetapi juga mulai dimanfaatkan untuk mendukung akses menuju destinasi wisata di Kota Palangka Raya.

Namun, perkembangan layanan BRT masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam hal jangkauan rute, ketersediaan dan penataan infrastruktur pendukung, serta tingkat pemanfaatan oleh masyarakat yang masih berfluktuasi. Data jumlah penumpang layanan wisata pada 2020–2024 juga menunjukkan bahwa penggunaan BRT belum stabil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan infrastruktur saja belum cukup, tetapi perlu disertai peningkatan kualitas pelayanan agar masyarakat semakin tertarik menggunakan transportasi publik.

Dengan demikian, dinamika perkembangan BRT di Kota Palangka Raya menunjukkan adanya perubahan dan upaya pengembangan layanan, tetapi masih diperlukan penguatan sistem transportasi yang lebih terintegrasi. Pengembangan rute, halte, jadwal, serta keterhubungan dengan kawasan permukiman dan pusat kegiatan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar BRT dapat menjadi infrastruktur transportasi publik yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, pengembangan layanan BRT di Kota Palangka Raya perlu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Pemerintah daerah melalui instansi terkait dapat

meningkatkan jangkauan rute dan menambah halte pada kawasan yang memiliki aktivitas masyarakat tinggi agar layanan BRT lebih mudah dijangkau.

Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan juga perlu menjadi perhatian, terutama terkait ketepatan jadwal, waktu tunggu, kenyamanan, dan informasi mengenai rute. Hal tersebut penting karena kemudahan dan kualitas pelayanan dapat memengaruhi minat masyarakat dalam memilih transportasi publik.

Pemerintah juga dapat memperkuat integrasi BRT dengan kawasan permukiman, pusat pendidikan, pusat pemerintahan, dan destinasi wisata. Pengembangan layanan wisata yang telah dilakukan dapat terus dikembangkan dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat dan pola perjalanan pengguna.

Terakhir, diperlukan evaluasi secara berkala terhadap jumlah penumpang, efektivitas rute, kondisi halte, serta respons masyarakat. Evaluasi tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan pengembangan layanan BRT berikutnya sehingga pembangunan infrastruktur transportasi tidak hanya berorientasi pada penambahan fasilitas, tetapi juga pada peningkatan pemanfaatan dan kualitas pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Anjely, I. N. (2025). *Analisis kebijakan transportasi publik: Studi kasus pra-sistem Bus Rapid Transit (BRT) oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya tahun 2024* [Tesis magister, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya].

Bagaskara, M. B., Silitonga, S. P., & Elvina, I. (2023). Potensi pengembangan bus pariwisata Bus Rapid Transit Kota Palangka Raya. *Jurnal Serambi Engineering, 8*(1), 4374–4380. https://doi.org/10.32672/jse.v8i1.5528

Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya. (2025). *Bus BRT gratis Dishub Kota Palangka Raya kembali beroperasi ke tempat wisata*. Pemerintah Kota Palangka Raya.

Fakhtian, F. I., & Budiharjo, A. (2021). Evaluasi rute dan lokasi halte Bus Rapid Transit (BRT) Koridor II di Palangka Raya. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik, 8*(1), 11–20. https://doi.org/10.25292/j.mtl.v8i1.487

Murniati, Silitonga, S. P., & Darlin, D. R. (2017). Analisis interaksi tata guna lahan terhadap ketersediaan parkir dan skenario pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT): Studi kasus Pasar Besar Kota Palangka Raya. *Jurnal Teknika: Jurnal Teoritis dan Terapan Bidang Keteknikan, 1*(1), 33–40. https://doi.org/10.52868/jt.v1i1.1371

Pratiwi, D. H. (2024). *Perencanaan angkutan umum dengan konsep BRT di Kota Palangka Raya* [Skripsi sarjana terapan, Politeknik Transportasi Darat Indonesia–STTD].

Utami, A. L. (2020). Potensi transportasi umum dalam mendukung pengembangan pariwisata Kota Palangka Raya. *Jurnal Transportasi, 20*(3), 201–212. https://journal.unpar.ac.id/index.php/jurnaltransportasi/article/view/4467

Yayasan Bhakti Otonomi Daerah. (2023). *Hasil kajian collaborative governance bidang transportasi publik di Kota Palangka Raya tahun 2023*.

Yuslye, D. D., Murniati, & Riani, D. (2021). Analisis hubungan antara variabel pemilihan moda transportasi di Kota Palangka Raya. *Spektrum Sipil, 8*(2), 117–127. https://doi.org/10.29303/spektrum.v8i2.216